

# **TESIS**

## **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect of Financial Statement Presentation and Financial Supervision on  
the Financial Performance of Regional Financial Institutions and Assets in  
North Toraja Regency*

**SERLIN PALEMBANGAN  
A042202003**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **TESIS**

## **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect of Financial Statement Presentation and Financial Supervision on the Financial Performance of Regional Financial Institutions and Assets in North Toraja Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**SERLIN PALEMBANGAN  
A042202003**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## TESIS

### **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

*The Effect of Financial Statement Presentation and Financial Supervision on the Financial Performance of Regional Financial Institutions and Assets in North Toraja Regency*

disusun dan diajukan oleh

**SERLIN PALEMBANGAN**  
**A042202003**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 08 Juli 2022

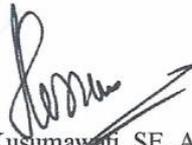
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

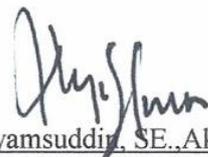
Pembimbing Pendamping,

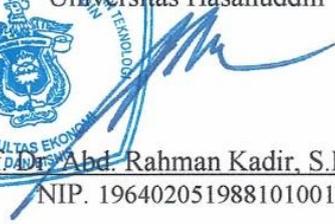
  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

  
Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196604051992032003

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001

  
Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SERLIN PALEMBANGAN**

NIM : **A042202003**

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

### **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2022

Yang menyatakan,



**SERLIN PALEMBANGAN**  
A042202003

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, dan Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA**, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Terima kasih kepada ayah dan ibu,, saudara-saudara, teman-teman peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis/disertasi ini terselesaikan dengan baik.;
8. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tesis ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juni 2022

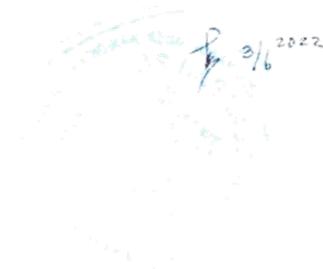
Peneliti

## ABSTRAK

**SERLIN PALEMBANGAN. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara** (dibimbing oleh Abd. Rahman Kadir dan Andi Kusumawati).

Fenomena kinerja keuangan dengan melihat pengaruh penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah belum diketahui berlangsung dengan baik atau tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Rancangan penelitian digunakan dengan metode asosiatif dan pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 46 orang pegawai ASN dan TKD. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Data diuji menggunakan analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. Kami menemukan, penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Kata kunci: penyajian laporan keuangan, pengawasan keuangan, kinerja keuangan



## ABSTRACT

SERLIN PALEMBANGAN. **The Effect of Financial Statement Presentation and Financial Supervision on the Financial Performance of Regional Financial Institutions and Assets in North Toraja Regency** (guided by Abd. Rahman Kadir and Andi Kusumawati).

With the phenomenon regarding financial performance, researchers are interested in finding out the whether effect of presentation of financial statement and financial supervision on local financial performance is good or not. The aim of this study is to analyze and explain the effect of presentation of financial report and financial supervision of financial performance of Regional Financial and Asset Agency in North Toraja Regency. In this study, the researchers used a research design with associative research method. The approach used is a quantitative approach. The samples consist of 46 ASN and TKD employees. The data in this study were obtained by using questionnaires. This research was tested using Multiple Lenear Regression Analysis with SPSS application. The results indicate that the presentation of financial statements and financial supervision has a significant effect on the financial performance of the Regional Financial and Assets Agency of North Toraja Regency.

Keywords: presentation of financial statements, financial supervision, financial performance.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Teoritis.....	12
2.1.1 Agency Theory .....	12
2.1.2 Agency Theory.....	13
2.1.3 Laporan Keuangan .....	14
2.1.4 Pengawasan Keuangan .....	21
2.1.5 Kinerja keuangan .....	37
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya .....	43

### **BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

3.1 Kerangka Konseptual.....	49
3.2 Hipotesis .....	50

3.2.1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara. ....	50
3.2.2	Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara. ....	51
3.2.3	Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan Secara Simultan berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara .....	52

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1	Rancangan Penelitian.....	53
4.2	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	53
4.3	Populasi dan Sampel.....	53
4.4	Jenis dan Sumber Data .....	54
4.5	Metode Pengumpulan Data .....	55
4.6	Definisi Operasional Variabel .....	56
4.7	Teknik Pengumpulan Data .....	58
4.8	Instrument Penelitian.....	60
4.9	Uji Validitas dan Reabilitas.....	60
4.10	Teknik Analisis Data .....	61

#### **BAB V HASIL PENELITIAN**

5.1	Uji Validitas dan Reabilitas.....	67
5.1.1	Uji Validitas.....	67
5.1.2	Uji Reliabilitas .....	68
5.2	Profil Responden .....	69
5.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	69
5.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	70
5.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71
5.3	Deskripsi Tanggapan Responden .....	72
5.4	Tanggapan Responden.....	72

5.4.1	Deskripsi tanggapan responden variable Penyajian Laporan Keuangan (X1).....	72
5.4.2	Deskripsi tanggapan responden variable Pengawasan Keuangan (X2).....	74
5.4.3	Deskripsi tanggapan responden variable Kinerja Keuangan (Y).....	75
5.5	Uji Asumsi Klasik .....	
5.5.1	Uji Normalitas.....	78
5.5.2	Uji Multikolineritas.....	80
5.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	81
5.5.4	Uji Autokorelasi.....	83
5.5.5	Uji Linearitas .....	83
5.6	Hasil Analisis Data .....	84
5.6.1	Analisis Regresi Linear Berganda .....	84
5.7	Pengujian Hipotesis .....	85
5.7.1	Uji t .....	86
5.7.2	Uji F.....	87

## **BAB VI PEMBAHASAN**

6.1	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara .....	89
6.2	Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.....	93
6.3	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan secara Bersama-sama Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.....	96

## **BAB VII PENUTUP**

7.1	Kesimpulan.....	99
7.2	Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas .....	67
Tabel 5.2 Hasil Uji Reabilitas .....	69
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia .....	70
Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Tentang Penyajian Laporan Keuangan .....	72
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan Keuangan .....	74
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Variabel Kinerja Keuangan .....	76
Tabel 5.9 Hasil Uji Normalitas Statistic Kolgomorov-Smirnov .....	78
Tabel 5.10 Hasil Uji Multikolinieritas .....	81
Tabel 5.11 Hasil Uji Autokorelasi.....	83
Tabel 5.12 Hasil Uji Linearitas .....	84
Tabel 5.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda (Coeffients).....	84
Tabel 5.14 Uji F (Anova) .....	87
Tabel 5.15 Koefisien Determinasi (Model Summary) .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Skema Karangka Konseptual Peneliti .....	50
Gambar 5.1 Uji Normalitas Histogram .....	79
Gambar 5.2 Uji Normalitas Probability Plot.....	80
Gambar 5.3 Uji Heteroskedastisitas .....	83

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dalam masa sekarang ini, banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya penemuan-penemuan yang baru, serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mempunyai tugas utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kepada pihak berkepentingan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti Aliyah dan Aida Nahar 2012).

Penyajian laporan keuangan dan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan akan memudahkan para praktisi akademik untuk bisa menilai kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah dalam hal ini dikhususkan dalam penilaian kinerja keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah tiap tahunnya.

Menurut Irham Fahmi (2015) yang menyatakan bahwa “Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan mendatang”.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan

pertanggungjawaban keuangan daerah dasar penilaian kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan Instansi tersebut. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan *surplus* atau *defisit* untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Menurut Irhan Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan Pasal 330 undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan Daerah dengan sebuah peraturan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun dan anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dan dikelola secara sistematis.

Selain dari Penyajian Laporan Keuangan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan yaitu Pengawasan Keuangan. Dimana pengawasan merupakan hal yang penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu

penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan ataupun pemerintah.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat eknis.

Pengawasan keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah melakukan pengelolaan secara baik dan benar. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan keuangan akan membantu mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerintah baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban, dengan demikian dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Purnama, 2016).

Fenomena terkait kinerja pemerintah Kabupaten Toraja Utara di tinjau dari Kinerja Keuangan dapat dilihat dari realisasi anggaran. 1) Laporan realisasi anggaran daerah tahun 2020 pada item alokasi pembiayaan diperoleh rasio efisiensi 6.38%. (LRA PPKD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020). Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada sektor keuangan periode tersebut sudah maksimal sebab ditinjau dari realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada item pembiayaan sudah sangat efisien dengan ketentuan apabila nilai rasio efisiensi 0 – 20 % menunjukkan bahwa anggaran tersebut sangat efisien. 2) Laporan Realisasi Anggaran Daerah Tahun 2020, anggaran pendapatan daerah dari pendapatan hibah diperoleh rasio efektivitas 99,75%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada sektor keuangan periode tersebut sudah maksimal sebab ditinjau dari anggaran pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah dari pendapatan hibah efektif dengan ketentuan apabila nilai rasio efektivitas lebih 90% - 100% menunjukkan bahwa anggaran tersebut efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurhayati (2015) yang berjudul “Pengaruh Laporan keuangan berbasis akrual terhadap kinerja keuangan pemerintahan “Besarnya pengaruh laporan keuangan terhadap strategi peningkatan kinerja adalah 0.587 artinya memiliki pengaruh yang cukup kuat. Besarnya pengaruh variabel non laporan keuangan terhadap strategi peningkatan kinerja adalah -0,162 berarti laporan non keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap strategi peningkatan kerja.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dodi (2014) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Elda (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money* Pada Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). Rumusan masalah apakah ada pengaruh Pengawasan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money* Pada Pemerintah Kota Malang?”. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Pengawasan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money* Kota Malang. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian analisis data dengan bantuan SPSS 16.00 menunjukkan bahwa 1) Terdapat pengaruh secara signifikan antara Pengawasan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja

Pemerintah Berkonsep *Value for money*. 2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah berkonsep *Value for money*. 3) Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money*.

Dari hasil observasi penelitian salah satu Fenomena yang muncul dari kelemahan tersebut adalah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya. Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara yang mencerminkan prestasi kerja dalam mengelola kinerja keuangannya.

Penelitian ini di replika dari penelitian Natalia Elda (2020) dengan Judul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money* Pada Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)”. Rumusan masalah apakah ada pengaruh Pengawasan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money* Pada Pemerintah Kota Malang?”.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan saat ini terletak pada daerah penelitian dan rumusan masalahnya. Dimana pada penelitian ini peneliti membahas tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan Dan Aset

Daerah Di Kabupaten Toraja Utara. Selain dari pada itu Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang aktif pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara, dimana Pegawai ASN berjumlah 21 orang dan pegawai TKD berjumlah 25 orang. Sedangkan pada penelitian terdahulu jumlah populasi yang digunakan adalah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Malang yang berjumlah 46 orang, dan kriteria yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah staf keuangan yang bekerja di BPKAD Kota Malang yang memiliki masa kerja minimal satu Tahun, berlatar belakang Pendidikan ekonomi/akuntansi minimal D3.

Dengan adanya fenomena tersebut peneliti ingin melihat pengaruh penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah dengan baik atau tidak baiknya. Dari penyusunan laporan keuangan apakah penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di kabupaten Toraja Utara, Dengan judul : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara ?

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan agar dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya untuk masa yang akan datang untuk pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan informasi untuk kajian topik-topik dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pengaruh penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan pengelola keuangan daerah, serta dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis adalah dapat menambah ilmu dan wawasan tentang kinerja keuangan pengelola daerah terkait penyajian laporan keuangan dan pengawasan keuangannya serta memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Hehanussa, 2015). Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan *stakeholder*. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan *stakeholder*, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap *stakeholder* lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang teori keagenan tersebut, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* memberikan wewenang pengaturan kepada *agent* dan memberikan sumber daya kepada *agent* (dalam bentuk pajak dan lain sebagainya). Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas wewenang yang sudah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dengan

begitu masyarakat dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan.

### **2.1.2 *Signalling Theory***

Teori signal merupakan pengembangan dari teori keagenan dimana teori ini berkaitan dengan hubungan antara manajemen dan penerima informasi yang menunjukkan adanya asimetri antara pihak manajemen perusahaan dan pihak yang berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan tersebut. Dasar teori signal adalah ketidakseimbangan perolehan informasi yang menjadi alasan bagi pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi melalui laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi dapat terjadi diantara dua kondisi ekstern yaitu perbedaan informasi yang kecil sehingga tidak mempengaruhi manajemen, atau perbedaan yang sangat signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap manajemen (Sartono, 2002).

Kaitannya dari teori signal dengan penelitian ini adalah teori signal dijelaskan mengenai pentingnya pemberian informasi yang harus diberikan kepada pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam dalam hal ini yaitu pemerintah itu sendiri sedangkan pihak luar yaitu DPRD, Inspektorat dan Masyarakat. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dapat menjadi signal bagi pihak luar, terutama bagi pihak yang berkepentingan adalah laporan tahunan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Semua pengguna informasi keuangan tentunya

memerlukan informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tersebut. Sehingga pengguna informasi keuangan dapat mengukur kinerja pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.

### **2.1.3 Laporan Keuangan**

#### **1) Pengertian Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Laporan Keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah Informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Menurut Diamond (2002) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkapkan secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari :

a. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, *Surplus / Defisit* L-O pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan keuangan

suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklafikasikan kewajibannya menjadi jangka pendek dan jangka panjang.

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Struktur Neraca Pemerintahan Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintahan Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah Kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan penyusunan dan penyajian aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan sekelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

c. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

pendanaan dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan atas Laporan keuangan (CaLk). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan daerah yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggung jawaban keuangan daerah. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja

pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauh mana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintah, sehingga kinerja pemerintah dapat terindifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut.

## **2) Indikator Kualitatif Laporan Keuangan**

Menurut Bastian (2006), terdapat empat Indikator kualitatif laporan keuangan yaitu :

### **1) Relevan.**

Relevan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang relevan memiliki unsur berikut :

#### **a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).**

Informasi ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

b. Manfaat Prediktif (*prediktive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timeliness*)

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

d. Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Handal.

Handal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki unsur berikut:

a. Dapat diuji kebenarannya (*variable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Penyajian secara wajar

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3) Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

#### **2.1.4 Pengawasan Keuangan**

**1) Pengertian Pengawasan**

Menurut Halim dan Iqbal, (2012): “Secara umum pengawasan dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.” Sedangkan menurut Sonny Sumarsono, (2010) mengemukakan sebagai berikut: “Pengawasan adalah Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar

penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan”. “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sondang P. Siagian (2014) mengemukakan sebagai berikut: “Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Saydam dalam kadarisman (2012) menjelaskan sebagai berikut: “Pengawasan merupakan kegiatan manajerial, dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan karyawan. Para karyawan yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang tidak memperoleh bimbingan”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal dari organisasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menentukan apa yang salah di dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.

## **2) Manfaat dan Keuntungan Pengawasan**

Menurut Harahap (2012) yang mengemukakan apabila sistem pengawasan kerja itu dapat berjalan dengan baik berdasarkan standar pengawasan dan metode yang sesuai maka diperoleh berbagai manfaat atau keuntungan antara lain: 1. Tujuan yang dicapai akan lebih cepat, mudah dan murah. 2. Menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan keterusterangan. 3. Menimbulkan saling percaya dan menghilangkan rasa curiga. 4. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab. 5. Memberikan iklim persaingan yang sehat, sehingga karyawan berprestasi.

## **3) Prinsip-Prinsip Dalam Proses Pengawasan**

Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Sukarna (2011).

Menetapkan atas prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*)
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*)
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbillity*)
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)
5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)
6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitabillity*)

8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*)
9. Prinsip Standar (*Principle of standar*)
10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)
11. Prinsip Kekecualian (*The expection Principle*)
12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*)
13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)
14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*).

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*).  
Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau devisiasi perencanaan.
2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*).  
Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari devisiasi-devisiasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan
3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbility*). Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila mananjer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*).

Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

5. Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*).

Teknik kontrol yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.

6. Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*).

Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.

7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizational suitability*).

Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.

8. Prinsip azas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*).

Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer, Teknik kontrol harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.

9. Prinsip Standar (*Principle of standar*).

Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.

10. Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.

11. Prinsip Kekecualian (*The exception Principle*).

Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.

12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*).

Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*).

Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*).

Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, *staffing* dan *Directing*

#### **4) Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

#### **5) Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2011: “Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat

membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien”

Adapun menurut Sonny Sumarsono, (2010) pengertian pengawasan fungsional adalah sebagai berikut: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.”

#### **6) Jenis-Jenis Pengawasan Keuangan Daerah**

Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, seperti yang dikutip Riawan Tjandra (2013) yaitu mengklasifikasikan pengawasan seperti berikut ini:

- a. Pengawasan dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol pengawasan yaitu:
  1. Kontrol Intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hirarkis.
  2. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga tidak memiliki struktural didalamnya. Contohnya adalah pengawasan keuangan yang dilakukan oleh badan independen, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu, baik kontrol politis yang dilakukan oleh MPR dan DPRD terhadap pemerintah eksekutif dan juga kontrol reaktif yang dilakukan oleh badan peradilan.

- b. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan yaitu:
  - 1. Pengawasan a-priori yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan dimana pengawasan ini juga dapat disebut sebagai pengawasan yang mengandung unsur preventifnya artinya pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya kekeliruan.
  - 2. Pengawasan a-posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan represif yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara.
- c. Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi yaitu:
  - 1. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari aspek- aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum sehingga dalam melakukan setiap kegiatan harus jelas landasan hukumnya.
  - 2. Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek dimana suatu tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah satu tujuan negara

yaitu mensejahterakan rakyat dan yang menjalankan negara adalah pemerintah

#### **7) Fungsi Pengawasan Keuangan**

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti diatas, DPRD juga melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah”.

Menurut Pedansa (2013) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD pada kesempatan ini meliputi: “Pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksanaan Kunjungan

Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan Pelaksanaan Rapat Kerja. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi relevan”.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pada pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap penyusunan dan pelaporan APBD.

#### **8) Karakteristik Pengawasan Keuangan**

Siswanto (2009) mengemukakan secara umum terdapat Sembilan karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif, yaitu:

1. Akurat (*Accurate*)
2. Tepat waktu (*Timely*)
3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)

4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)
5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)
6. Secara organisasi realistik (*Organizationally realistic*)
7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)
8. Fleksibel (*Flexible*)
9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)
10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)

Adapun penjelasan dari karakteristik-karakteristik pengawasan keuangan diatas adalah sebagai berikut:

a. Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

b. Tepat waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

c. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)

Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem pengendalian, makin besar kemungkinannya bahwa

individu dengan sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi diantara para karyawan.

- d. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)

Sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengendalian strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

- e. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

- f. Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*)

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan

menyusul kemudian. Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistis. Perbedaan status di antara individu harus dihargai juga.

- g. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's workflow*)

Informasi pengendalian perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengendalian harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

- h. Fleksibel (*Flexible*)

Sistem pengendalian yang efektif harus dapat mengikuti perkembangan yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

- i. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)

Pengendalian yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*) Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengendalian tersebut harus berhubungan

dengan tujuan dan prinsip yang berarti sehingga dapat diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan. Dengan diterimanya sistem pengendalian, maka setiap anggota akan merasa ikut bertanggung jawab terhadap usaha mencapai tujuan.

#### **9) Indikator Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Tahun 2018 indikator dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, antara lain :

##### **1. Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Keterlambatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan APBD dikarenakan adanya:

- a) Keterlambatan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sehingga terlambat diserahkan kepala daerah kepada DPRD.
- b) Kurangnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
- c) DPRD tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik.
- d) Tidak adanya akses bagi masyarakat pada proses pembahasan RAPBD karena rapat badan anggaran dan komisi bersifat tertutup.

- e) Terjadinya tarik ulur kepentingan politik lokal.
- f) Keterlambatannya evaluasi oleh pemerintah.

## 2. Opini BPK Pemerintah Provinsi

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu dari empat jenis opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dikarenakan:

- a. Masih lemahnya pengelolaan/administrasi aset
- b. Pengelolaan aset tidak taat asas
- c. Tindak lanjut hasil temuan tahun sebelumnya tidak tuntas.

## 3. Realisasi Belanja APBD

Meningkatnya Realisasi Belanja APBD akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Realisasi belanja APBD bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Adapun penyebab tidak terealisasinya belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikarenakan:

- a) Penetapan perda APBD yang tidak tepat waktu.
- b) Melakukan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan.
- c) Tidak maksimalnya penyerapan dari masing- masing OPD.
- d) Lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh Pemda.

### **2.1.5 Kinerja Keuangan**

#### **1) Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, dan tentunya dari segi *outcome*. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan nonkeuangan. Untuk melakukan pengukuran kinerja dengan melihat variabel kunci kemudian dikembangkan pada unit kerja yang bersangkutan untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, dari sinilah kita bisa mengetahui kinerja suatu organisasi sudah sesuai dengan yang direncanakan meliputi ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan lain-lain atau

tidak. Jika tidak tercapai maka dikatakan bahwa pengukuran kinerja suatu organisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dan jika pencapaiannya melebihi dari yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa entitas tersebut memiliki kinerja yang sangat baik (Abdul Halim, 2012).

Kinerja keuangan adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Menurut Sularso dan Restianto (2011) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam sektor pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk

kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986):

- a. Kemampuan struktural organisasinya. Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- b. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
- c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan
- d. Kemampuan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **2) Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002):

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

## **3) Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi :

a. Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

## **2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Ademirna (2016) meneliti tentang Pengaruh Kinerja keuangan, opini audit, dan lingkungan Masyarakat terhadap kepatuhan pengungkapan Informasi keuangan pemerintah daerah dengan Akuntabilitas sebagai variabel moderating (studi empiris pada skpd kabupaten gowa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa tiga dari tiga determinan secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan pengungkapan informasi keuangan yaitu kinerja keuangan, opini audit dan lingkungan masyarakat. Sedangkan analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa akuntabilitas hanya mampu memoderasi kinerja keuangan, dan lingkungan masyarakat terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Reza Rinova (2019) meneliti tentang Pengaruh kinerja keuangan pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada daerah pemekaran di Pulau Sumatera). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh

langsung kinerja keuangan pemerintah daerah yang baru dibentuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini terbagi atas 3 bagian yaitu: (1) Hipotesis pertama tentang rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi terdukung atau diterima, (2) Hipotesis kedua tentang rasio ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terdukung atau tidak diterima, dan (3) Hipotesis ketiga tentang rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi terdukung atau diterima.

Tri Yuni Pratiwi (2018) meneliti tentang Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, Dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2016. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh (1) Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, (2) Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, (3) Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, (4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( $Y$ ), 2) Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa tengah, 3) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, 4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Salomi J. Hehanussa (2015) meneliti tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Ambon). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (2) Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dan (3) Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas area pelaporan keuangan secara parsial atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Siti Aliyah dan Aida Nahar (2014) meneliti tentang Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Jepara). Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Ainul Ridha (2018) meneliti tentang Pengaruh laporan keuangan berbasis akrual terhadap kinerja keuangan pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laporan keuangan berbasis akrual terhadap kinerja keuangan Pemerintah Aceh. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan: 1) Variabel laporan keuangan basis akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Aceh yaitu sebesar 1,862 atau pada skala likert 2 yang berarti tidak setuju, dan nilai koefisien korelasi (R sebesar 0,857 atau 85,7%. 2) Hasil pengujian statistik memperlihatkan nilai, hasil variabel independen (laporan keuangan basis akrual) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Natalia Elda (2020) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money* Pada Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Pengawasan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money* Kota Malang. Model analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria tertentu untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan

kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berjumlah 46 kuesioner atau (92%). Pengujian asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dengan bantuan SPSS 16.00 menunjukkan bahwa 1) Terdapat pengaruh secara signifikan antara Pengawasan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah Berkonsep *Value for money*. 2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah berkonsep *Value for money*. 3) Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan antara Penyajian Laporan Keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *value for money*.

Yohana Maria Viane Ina Laga (2021) meneliti tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 1) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, 2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, 3) Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Studi ini menggunakan penyebaran kuesioner, kemudian jawaban dari responden akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan menggunakan program analisis regresi berganda dibantu dengan menggunakan data *Statistical Product And Service Solution* (SPSS 24). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) secara parsial pengawasan

keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, 2) Secara parsial Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, 3) Secara parsial Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

## **BAB III**

### **KARANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

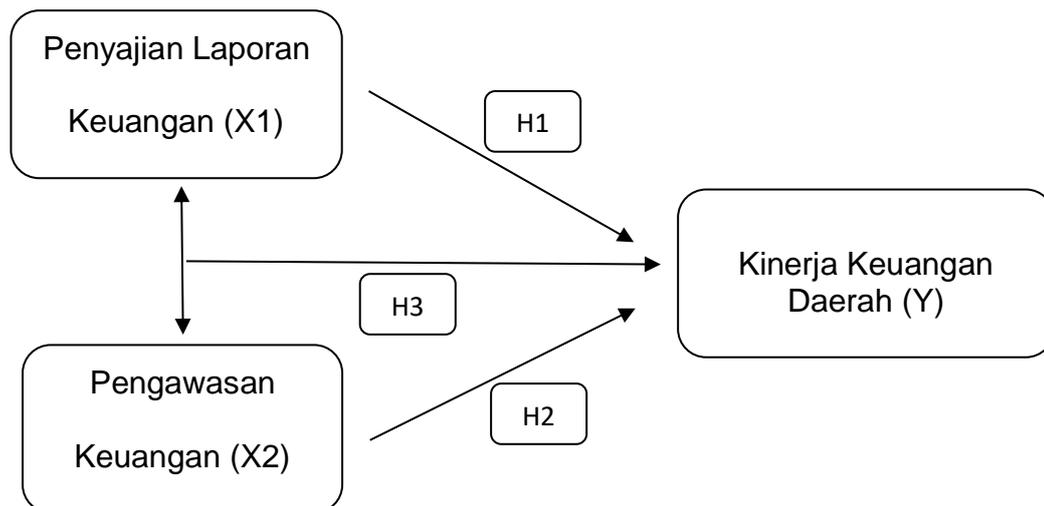
#### **3.1. Karangka Konseptual**

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kerja perusahaan atau instansi tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca Laporan Laba Rugi yang Komperhensif.

Pengawasan Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu di atas maka karangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual Peneliti**

## **3.2. Hipotesis**

### **3.2.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara.**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Hehanussa, 2015).

Penelitian yang dilakukan Hehanussa (2015), penyajian laporan keuangan secara empiris terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut didukung oleh Penelitian Aliyah dan Nahar (2012), bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara**

### **3.2.2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara.**

Pengawasan Keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah melakukan pengelolaan secara baik dan benar. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan keuangan akan membantu mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerintah baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban, dengan demikian dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Purnama, 2016).

Penelitian yang dilakukan Natalia Elda (2020), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *Value for Money*. Hasil tersebut didukung oleh Penelitian Yohana Maria Vianei Ina Laga (2021), bahwa secara persial pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H2 : Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara.**

**3.2.3. Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan Secara Simultan berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara.**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Natalia Elda (2020), terdapat pengaruh secara signifikan antara pengawasan keuangan dan penyajian laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah berkonsep *Value for Money*.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H3 : Penyajian Laporan Keuangan dan Pengawasan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Toraja Utara.**